

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan
Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Provinsi Riau**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



HARIS WAHYUDI

NPM : 167110431

**JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PEKANBARU

2020

MANAJEMEN PENGENDALIAN PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

ABSTRAK

HARIS WAHYUDI

167110431

Kata Kunci : Pengendalian, Kebakaran Hutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu : 1. Kendala yang dihadapi DLHK Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran udara antara lain kurangnya pemahaman masyarakat 2. Sulitnya akses ketempat kejadian kebakaran hutan dan proses pemadaman dan pencegahan yang terbatas dan bukti – bukti yang kurang lengkap dalam proses penyelesaian permasalahan kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai apa adanya. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, staff bidang pengendalian, dan masyarakat yang terdampak kebakaran. Dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan simple random sampling. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengendalian H.B Siswanto. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket, wawancara, observasi dan selanjutnya di analisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan yang bisa diambil adalah belum maksimalnya kinerja pegawai kemudian masih belum tegas sanksi terhadap perusahaan.

MANAJEMEN PENGENDALIAN PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

ABSTRACK

HARIS WAHYUDI

167110431

Keywords: Controlling, Forest fires

The aim of this study is to determine and analyze the management of environmental damage caused by forest fires by the Environment and Forest Service of Riau Province. The following problems arise: 1. One of the obstacles facing DLHK Riau Province in overcoming air pollution is a lack of public understanding.

2. Difficult access to forest fires and limited control and prevention processes and incomplete evidence for solving fire problems. This research used quantitative method with a descriptive approach, namely research that attempts to describe the object or subject to be studied as it is. The population and sample of this research were office heads, secretaries, field managers, department heads, control officers, and the communities affected by the fire. In this study, a sample was drawn using simple random samples. The theory used in this research is H.B. Siswanto. The data analysis techniques used in this study were questionnaires, interviews, observations and then quantitative analyzes, the results of which are presented in the form of tables, numbers, percentages and provided with supporting descriptions and information so that conclusions can be drawn. Based on the research results, it can be concluded that the employee's performance was not maximum and that there are no severe sanctions against the company.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 8 Juni 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Administrasi
Publik

Pembimbing


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Naskah skripsi secara keseluruhan telah dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh Karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Juni 2021

Ketua ,



Lilis Suriari, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si

Anggota,



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

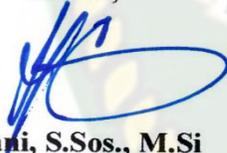
Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

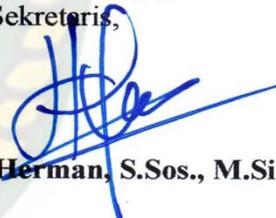
Pekanbaru, 8 Juni 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua ,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Herman, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi
Publik



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

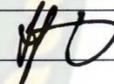
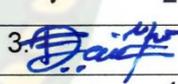
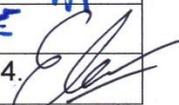
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 545/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 07 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 April 2021 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Manajamen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.**
Nilai Ujian : Angka : " 776 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 April 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 545/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Haris Wahyudi
N P M : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 April 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

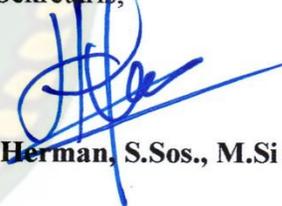
Pekanbaru, 8 Juni 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua ,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Herman, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi
Publik



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau”, dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Ibu Lilis Suryani ,S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik;
4. Ibu Lilis Suryani ,S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa untuk kedua orang tua saya ayah H. Ir. Sukardji,M.Si dan Ibu Hj. Sunarti yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material.

8. Kemudian untuk Mbak dan Mas saya Ika Atika Puspita S.Pd dan Krisnawan Andiyanto STr yang selalu memberi dukungan moral maupun material.
9. Dan tidak lupa mbak saya satu lagi Resarizki Utami ST., M.Si yang selalu memberi dukungan moral maupun material.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.
11. Teruntuk Alm. Raka Siwih S.Ip yang banyak membantu dalam membuat penulisan skripsi ini dan memberi saran serta motivasi.
12. EastCrew Pekanbaru memberikan support, masukan, dan saran kepada penulis.
13. Sepupu yang selalu membantu Mas faisal, Adil, Gading, Cika, Mas Eka.
14. Teman – teman Calon Sarjana yang memberi support

Akhir kata hanya ucapan terima kasih yang bisa di berikan oleh penulis, semoga allah swt membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelencaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah kahasa cakrawal pemikiran bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Penulis

Haris Wahyudi

DAFTAR ISI

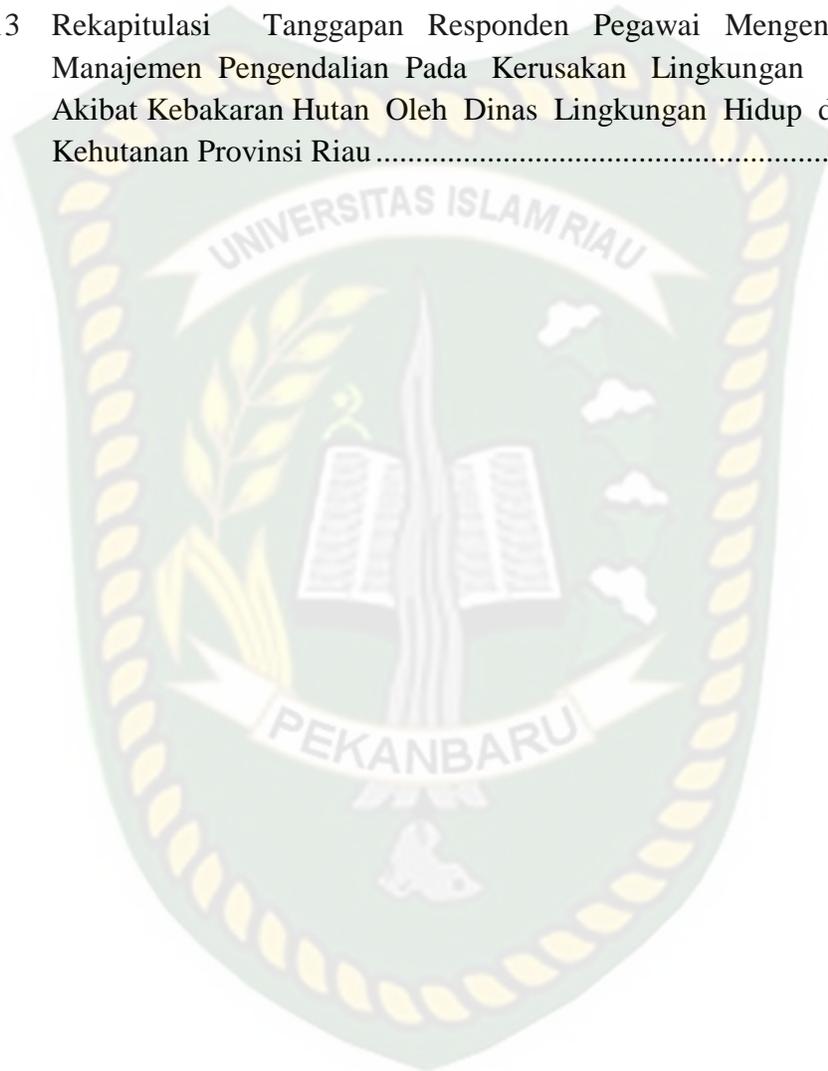
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Administrasi	12
2. Konsep Organisasi.....	15
3. Konsep Manajemen	18
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	22
5. Konsep Manajemen Pengendalian	23
B. Kerangka Pikiran	25
C. Konsep Operasional.....	26
D. Operasional Variabel	28
E. Teknik Pengukuran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Teknik Penarikan Sampel.....	33
E. Jenis dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35

BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau	37
	B. Sejarah Ringkas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau	40
	C. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.....	43
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Identitas Responden.....	60
	B. Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	63
	C. Rekapitulasi Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	78
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

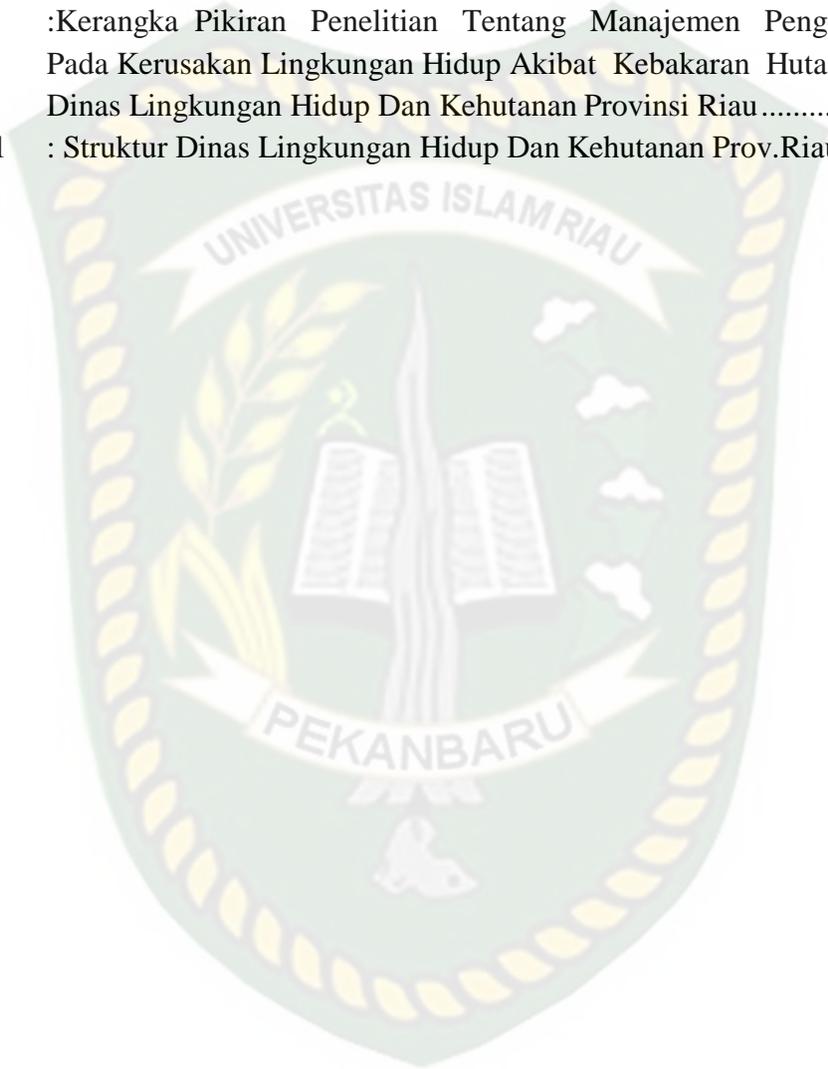
Tabel		Halaman
I.1	:Data Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Tahun 2019.....	8
II.1	:Operasional Variabel Manajemen Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	28
III.1	:Populasi Dan Sampel Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	32
III.2	:Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.....	35
IV.1	Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
IV.2	Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Golongan	55
IV.3	Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon	55
IV.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	56
IV.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	56
V.1	Distribusi Pendidikan Responden.....	60
V.2	Distribusi Usia Responden	61
V.3	Distribusi Jenis Kelamin Responden	61
V.4	Distribusi Pekerjaan Responden.....	62
V.5	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja Dengan Kriteria	63
V.6	Tanggapan Responden Pegawai Tentang Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja Dengan Kriteria	64
V.7	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Mengukur Kinerja	67
V.8	Tanggapan Responden Pegawai Tentang Mengukur Kinerja.....	68
V.9	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Membandingkan Kinerja dengan standar	71
V.10	Tanggapan Responden Pegawai Tentang Membandingkan Kinerja dengan standar	72
V.11	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Mengambil Tindakan Perbaikan	75
V.12	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Mengambil Tindakan Perbaikan	76

V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	78
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 :Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	25
IV.1 : Struktur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau	59



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Haris Wahyudi
NPM : 167110431
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.*

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 April 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah (selanjutnya disingkat SDA). SDA yang dimiliki Indonesia berupa SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral dan hasil tambang. Secara konstitusional, pengelolaan SDA dimaksud diserahkan pada Negara melalui konsep hak menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Hutan merupakan Sumber Daya Alam (SDA) terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Hutan adalah ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting bagi masyarakat dunia. Hutan Indonesia disebut sebagai paru – paru dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pohon yang ada dikawasan ini dapat memperbaharui kualitas udara sehingga menghasilkan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat dunia.

Di Indonesia terdapat beberapa pengelompokkan hutan sebagaimana telah diatur dalam undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), antara lain hutan hak, hutan adat, hutan konservasi dan hutang lindung. Pengelolaan atas hutan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui kebijakan

otonomi daerah seperti yang dirumuskan dalam konstitusi, Pemerintahan Daerah beserta lembaga terkait di tingkat daerah ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di daerah otonomi.

Sumber Daya Manusia adalah model pembangunan yang amat penting disamping adanya modal lain yang mendukung lancarnya pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, tenaga kerja, mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Karena pentingnya peranan tenaga kerja ini dalam pembangunan nasional sehingga dirasa yang ditetapkan.

Guna menunjang dan untuk meningkatkan kegiatan organisasi, pegawai/karyawan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, maka dari itu pimpinan yang memiliki bawahan perlu membina hubungan baik dengan pegawainya, dimana agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan cita – cita untuk bersama guna mencapai kemajuan sebuah organisasi. Setiap organisasi perlu memperhatikan kesejahteraan pegawainya agar pegawainya dapat bekerja dengan baik, professional, berdedikasi tinggi , penuh semangat dan berintegritas sehingga mencapai produktifitas kerja yang diharapkan. Untuk menyelenggaraan sebuah organisasi pemerintahan provinsi riau melalui sekretariat daerah Provinsi Riau dibantu oleh beberapa dinas/badan yang telah diberikan tugas pokok dan fungsi kepada dinas/badan tersebut untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan lembaga teknis yang ditetapkan.

Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, dan penerapan

prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau *controlling* ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya.

“Pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif”. (Menurut Jones and George,2003:331). Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

Pengendalian lingkungan hidup salah satu bentuk tugas yang cukup besar dan kompleks yang ditangani oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, karena tanpa adanya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan maka kelestarian alam yang ada disekitar akan mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan maka instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mandate/tugas untuk berperan aktif dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Masalah pengendalian kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tugas yang cukup kompleks yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Karena tanpa adanya pengendalian, kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan pencegahan, maka akan menimbulkan terjadinya kerusakan dan pencemaran yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat kedepan. Maka dibutuhkan keseimbangan alam dengan lingkungan sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Tujuannya dalam bertugas dan berperan melakukan pelestarian alam sesuai dengan pengendalian dampak lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup dibantu 4 bidang yaitu:

- a. Pengendalian kerusakan lingkungan.
- b. Pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Konservasi dan perubahan iklim.
- d. Serta penataan lingkungan.

Dari 4 bidang tersebut peneliti tertarik unttuk meneliti pada bidang pengendalian kerusakan lingkungan dengan alasan kerusakan lingkungan dapat di minimalisir melalui ilmu yang diperoleh, dan dapat diterapkan dikemudian hari.

Dalam menjalankan tugas khususnya pengendalian kerusakan lingkungan, badan lingkungan hidup perlu melakukan pengarsipan masalah – masalah yang dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Pengendalian kerusakan

lingkungan dilakukan sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dibutuhkan sehingga dapat menyelesaikan masalah pekerjaan yang dihadapi khususnya dalam pengendalian kerusakan lingkungan provinsi riau.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam periode 5 tahun kedepan. Sasaran utama (*main goal*) adalah mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu terwujudnya lingkungan hidup berkualitas. Indikator pencapaian sasaran utama ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Strategi dan kebijakan utama yang dilakukan adalah mengacu pada RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Riau 2019-2024 yaitu;

1. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Strategi-strategi yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat, dunia usaha dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah
2. Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan secara intensif
3. Membangun system perencanaan dan informasi lingkungan hidup daerah yang terpadu
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan azas kelestarian.

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu :

1. Memulihkan lahan kritis (terdegradasi/tercemar) secara terkoordinasi.

2. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.
3. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan DAS
5. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau

Dalam PERDA Provinsi Riau nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penataan Lingkungan Hidup Provinsi Riau pasal 4 (empat) menyebutkan “ Ruang lingkup pengelelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan ;
- b. Pemanfaatan ;
- c. Pengendalian ;
- d. Pemeliharaan ;
- e. Pengawasan ; dan
- f. Penegakan hukum.

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam komunitas global saat ini. Manajemen lingkungan efektif yang berfokus pada lingkungan mengikut sertakan praktek – praktek yang bertanggung jawab secara etika pada lingkungan baik dengan suatu proses yang cukup panjang dan kompleks. Hal ini menjadi alasan penulis ingin meneliti mengenai lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan semakin lama semakin luas, permasalahan yang muncul saat ini adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan membakar

hutan untuk membuka lahan perkebunan demi kepentingan bisnis. Dalam hal ini hutan disumatera salah satu daerah yang sering langganan kebakaran hutan salah satunya yaitu Provinsi Riau. Kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh pembakaran hutan secara sengaja.

Tabel I.1 Data Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Daerah (Kabupaten / Kota)	Luas Lahan (Hektar)
1.	Bengkalis	1.765,78
2.	Rokan Hilir	1.215,95
3.	Indragiri Hilir	827,35
4.	Siak	785,7
6.	Indragiri Hulu	386,1
5.	Meranti	349,7
8.	Pelalawan	344
7.	Dumai	325,25
9.	Kampar	255,53
10.	Pekanbaru	169,62
11.	Rokan Hulu	34,25
12.	Kuansing	15,1
Jumlah		6.452,39

Sumber : <https://www.liputan6.com>

Dari data diatas peneliti hanya mengambil satu daerah yang menjadi penyumbang kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan yaitu daerah kabupaten Pelalawan.

Akibat kebakaran hutan tentunya sangat merugikan masyarakat. Adapun dampak negatif dari kebakaran hutan yaitu :

- a. Hilang dan rusaknya habitat satwa liar.
- b. Meningkatnya emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim
- c. Mengganggu kegiatan ekonomis masyarakat.
- d. Mengganggu kesehatan masyarakat.

Dari keempat dampak diatas, dampak terbesar yang dirasakan oleh penduduk Provinsi Riau, termasuk daerah Kota Pekanbaru yaitu terganggunya aktifitas masyarakat, terganggunya kesehatan dll akibat pencemaran udara yang di dapat dari kebakaran hutan. Pasalnya, asap yang dikeluarkan dari kebakaran hutan menyebar hingga puluhan kilometer.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua masalah yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tanggung jawab DLHK Provinsi Riau. Persoalannya, DLHK Provinsi Riau merupakan salah satu instansi sektoral baru yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan di Provinsi Riau, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab terpisah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan PERDA PSD RIAU yang disahkan pada Desember 2016.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka penulis mengaitkan penjelasan tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terdapat fenomena – fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian pada diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi DLHK Provinsi Riau dalam peran menanggulangi pencemaran udara antara lain kurangnya pemahaman masyarakat.
2. Sulitnya akses ketempat kejadian kebakaran hutan dan untuk proses pemadaman dan pencegahan yang terbatas dan bukti – bukti yang kurang lengkap dalam proses penyelesaian permasalahan kebakaran hutan.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas serta fenomena – fenomena yang telah disajikan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana manajemen pengendalian pada bidang kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Pengendalian pada kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a) Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Manajemen pengendalian akibat kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- b) Secara praktis sebagai bahan masukan bagi Dinas untuk meningkatkan kebijakan dan keputusan sehubungan dengan manajemen pengendalian pada bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan hutan.
- c) Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Administrasi publik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang diinginkan adalah untuk membangun pemikiran yang bersifat sistematis dan analitik dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan sebagai dasar pemecah masalah.

1. Konsep Administrasi

Menurut Harbani pasalong (2012;51) bahwa Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif,efisien,dan rasional.

Selanjutnya Sugiono (2010;22) mendefinisikan Administrasi adalah sebagai suatu proses perencanaan,pengorganisasian,penggerakan,dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang – orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Menurut Siagian (2006;2) administrasi merupakan keseluruhan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Pasolong 2013;2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan – kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan – tujuan bersama.

Menurut Syafri (20012;5) misalnya administrasi yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara rerorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dari batasan tersebut oleh syafri diatas dapat diinterpretasikan, bahwa administrasi merupakan suatu proses dari rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang yang terstruktur dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan tidak mengesampingkan sumber daya yang digunakan.

Dari point – point dimensi administrasi yang telah dijelaskan bahwa peran administrasi sangatlah penting dan luas terlihat sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari, administrasi sebagai penggerak organisasi dan mengendalikan organisasi.

Menurut inu kencana syafi'ie (2013;6) dalam buku petunjuk administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu aktifitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama baik usaha pemerintah maupun swasta, baik usaha

sipil maupun usaha militer, usaha berskala besar maupun usaha berskala kecil.

- 3) Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang – orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
- 4) Suatu proses penyelenggara dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Leonard D. White dalam inu kencana syafi'ie (dalam pasolong 2013;3) mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum pada usaha kelompok – kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun ukuran kecil.

Menurut Hadari Nawawi (dalam syafi'ie, 2003;5) administrasi adalah rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan – kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dimock & Dimock, (dalam Pasolong;2013;3) mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperoleh. Dari batasan yang disebutkan oleh Dimock & Dimock diatas dapat di interprestasikan, bahwa administrasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari apa kemauan rakyat, dan bagaimana mendapatkan kemauan rakyat tersebut darri pemerintah, sedikit berbeda dari pendapat ahli sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi ialah sekumpulan orang proses pembagian kerja dan system kerjasama atau sistem sosial (Brantas 2009;75).

Sedangkan menurut James D. Money, (dalam Herujito 2014;4) “*organization is the form of every human association for the attainment of common purpose*”, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan setiap manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari batasan yang dikemukakan oleh James D. Mooney diatas dapat diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan manusia yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Siagian (2011;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang / sekelompok orang disebut bawahan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Siagian diatas diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah perkumpulan yang dibuat oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dari itu yang melakukan kegiatan kerja sama dalam suatu ikatan formal yang memiliki legitimasi hukum dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan Siagian menambah adanya seseorang atau beberapa orang atasan lainnya bawahan dalam organisasi tersebut.

Organisasi ialah sekumpulan orang, proses pembagian kerja, dan system kerjasama atau sistem social (Brantas 2009;75).

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu

organisasi yang baik di dalam internal organisasinya, tentunya dengan kata baik tersebut adalah pada dasarnya untuk memberikan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas atau penerima pelayanan yang baik menggunakan untuk kepentingan publik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan dan dijelaskan oleh Siagian (2003;97) dan adapun ciri-ciri organisasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Terdapat tujuan yang jelas
- 2) Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
- 3) Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang organisasi
- 4) Adanya kesatuan arah.
- 5) Adanya kesatuan perintah.
- 6) Adanya pembagian tugas.
- 7) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- 8) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
- 9) Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
- 10) Adanya jaminan jabatan.
- 11) Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
- 12) Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri organisasi tersebut diterapkan sebagian acuan dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan organisasi adalah tempat usaha atau sekelompok orang untuk melakukan kerjasama aktifitas menurut pembagian tugas, bekerja melalui aturan-aturan yang telah dibuat dan direncanakan demi mencapai tujuan personal dan organisasi.

Menurut Melayu S.P Hasibuan (2011;120) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan sebuah alat atau wadah.

Menurut George R.Terry (2011;82) mengatakan dalam dasar – dasar manajemen bahwa organisasi adalah proses pengelompokan kegiatan – kegiatan untuk mencapai tujuan – tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang menejer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota – anggota kelompok. Perkembangan organisasi adalah sangat berhubungan dengan hal penganalisaan masalah – masalah organisasi untuk meningkatkan hasil melalui orang – orang yang berada didalamnya.

Menurut Narayan dan Raghu Nath (dalam Akdon,2006;43) menyatakan bahwa “*an organization can be defined as an arena where human beings come tetgher to perform complex tasks, so as to fulfill common goal(s)*” organisasi

sebagai arena perserikatan orang – orang yang beraktifitas, orang – orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan.

Menurut Siagian (2003;96) organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang – orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang – orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang ada didalamnya, yang mana agar kerja orang – orang didalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia sangat diperlukan didalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja didalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Dwight Waldo (dalam Hamim,Sufian,2003;13) bahwa organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan – kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.

3. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan alat yang mengatur agar tercapai tujuan yang diinginkan. Karena manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. Setiap organisasi memerlukan yang

namanya manajemen. Suatu organisasi akan tetap berjalan dan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut.

Menurut Johan D.Millet (dalam Hamim,Sufian,2003;15) Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang – orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing – masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti sasaran yang telah ditetapkan semula George. R.Terry (dalam Hamim,Sufian,2003;16).

Menurut Stoner, et.al. (dalam Zulkifli,2005;28) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah diterapkan.

Manajemen tersebut dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain Siagian (2011;5).

Dari batasan yang dikemukakan oleh siagian diatas dapat diinterpretasikan, bahwa manajemen ada 2 (dua) fungsi seorang manajer (pemimpin) yaitu, sebagai proses pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam menerapkan tujuan dan sebagai seni atau kemampuan dalam menduduki jabatan

manajerial, dan dengan jabatan itu orang tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penggerakan orang lain dalam mencapai tujuan.

Menurut Johan F. Mee (dalam Hamim,Sufian,2003;16) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;28) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang – orang dan penerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar – benar tercapai.

Menurut Richard L. Daft (2012;6) manajemen adalah pencapaian tujuan – tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya – sumber daya organisasional. Definisi ini menurut Richard L. Daft mempunyai dua pemikiran penting yaitu; (1) keempat fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian. (2) pencapaian tujuan – tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Richard L. Daft (2012;6-8) menjelaskan fungsi – fungsi manajemen yang dimaksud meliputi:

a) Planning (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah mengidentifikasi sebagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapainya.

b) Organizing (pengelolaan)

Organizing atau pengelolaan suatu proses mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi.

c) Leading (kepemimpinan)

Leading atau kepemimpinan bertujuan untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan – tujuan organisasional, serta kepemimpinan menciptakan nilai – nilai dan budaya bersama, mengkomunikasikan tujuan – tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi serta menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja kepada karyawan.

d) Controlling (pengendalian)

Controlling atau pengendalian memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika di perlukan.

Menurut Simamora (2001:3), mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan – tujuan yang ditetapkan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Simamora diatas bahwa manajemen hanya pada proses perdayagunaan bahan baku dan manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan atau mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Hasibuan (2002;10) manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja perusahaan.

Menurut Mutiara S. Panggabean (dalam Rusby,Zulkifli,2016;2) MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sutrisno (2009;3) MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. MSDM harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu memerlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya.

Menurut Stoner (dalam Sutrisno,2009;4) manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan – tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual.

Menurut Umar MSDM merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Manajemen sumber

daya manusia mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan kinerjanya. (dalam Sutrisno;5)

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa MSDM merupakan suatu usaha maupun upaya yang dilakukan untuk mengelola manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Konsep Manajemen Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1995).

Menurut F.X. Kurniawan (2005) Pengendalian Manajemen adalah anggota organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi yang lain guna melaksanakan strategi perusahaan secara efektif dan efisien.

Menurut Robert J. Mokler (dalam Siswanto, 2013; 139) Pengendalian Merupakan memberikan batasan pengendalian yang menekankan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah.

Menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, Melayu S.P., 2016; 242) Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sudah dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut HB. Siswanto (2013; 141) pengendalian meliputi :

1. Menetapkan standard an metode untuk pengukuran kerja

Penetapan standard dan metode untuk pengukuran kinerja bisa

mencakup standard an ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja.

2. Mengukur kinerja

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif dengan frekuensi 24tanda bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali.

4. Mengambil tindakan

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah dibawah 24standar an analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan.

Menurut Earl P.strong (dalam Hasibuan,Melayu S.P,20116;241) Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perusahaan,agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan – ketetapan dalam rencana.

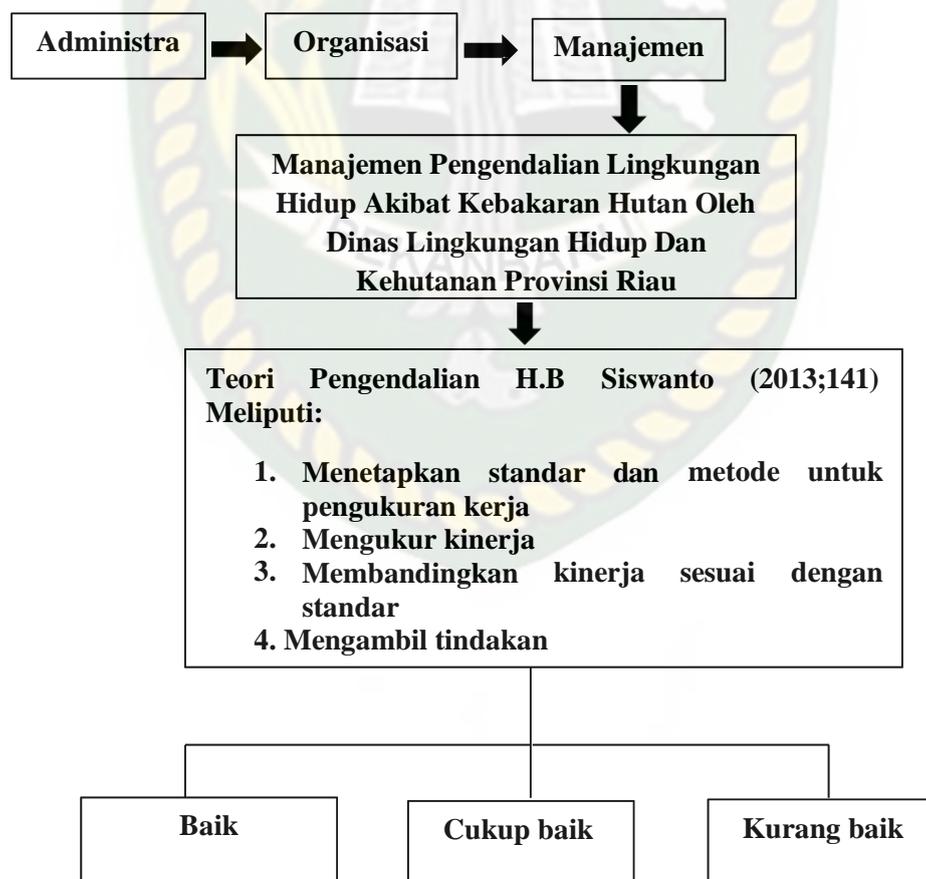
Menurut Jones and George (2003:331) mengenai pengertian pengendalian (controlling) ini, Pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah

strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran sangat diperlukan untuk menspesifikasi penelitian agar tujuan dan maksud yang dari penelitian ini dapat dibahas dengan mudah dan dipahami dengan mudah, baik oleh si peneliti ataupun oleh si pembacanya. Berikut ini kerangka pikir pada variable bagan:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



Sumber: Olahan Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan selanjutnya dalam penulisan ini, khususnya dalam menganalisis variabel dan indikator yang telah ditetapkan maka penulis mengoperasikan istilah – istilah yang digunakan agar mudah dipahami dan di mengerti.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

Maka, penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul yaitu:

1. Administrasi, merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.
3. Manajemen adalah proses Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan

psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.

5. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.
6. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui batas baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja adalah penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja yang bisa mencakup standar dan ukuran dalam segala hal.
8. Mengukur kinerja adalah proses yang berlanjut dan repretif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang diukur.
9. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar adalah menetapkan ukuran yang akan ditinjau atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.
10. Mengambil tindakan perbaikan adalah melakukan perbaikan atau koreksi secara langsung atau memperbaiki bila terjadi kesalahan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Manajemen Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Pengendalian meliputi: 1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kerja. 2. Mengukur kinerja 3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. 4. Mengambil tindakan perbaikan. HB. Siswanto (2013;141)	Manajemen pengendalian pada kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dengan kriteria	a. Menentukan prediksi kinerja. b. Pelaksanaan kinerja. c. Berpedoman pada standar	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		2. Mengukur kinerja	a. Penilaian pelaksanaan tugas. b. Memprediksi hasil laporan. c. Membandingkan hasil dan laporan.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		3. Membandingkan kinerja sesuai standar dengan kriteria	a. Membuat tolak ukur b. Pencapaian pelaksanaan kinerja c. Menetapkan kinerja aktual.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		4. Mengambil tindakan perbaikan	a.	

Sumber : olahan penulis, 2020

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu : Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

• Ukuran Variabel

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator penelitian berada dalam skala 67 – 100%.

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator penelitian berada dalam skala 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator penelitian berada dalam skala 0 – 33%.

Ukuran Indikator Variabel

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dan kriteria

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dan kriteria berada dalam skala 67 – 100%.

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dan kriteria berada dalam skala 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dan kriteria berada dalam skala 0 – 33%.

2. Mengukur Kinerja dengan Kriteria

Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja berada dalam skala 67 – 100%.	Mengukur
Cukup Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja berada dalam skala 34 – 66%.	Mengukur
Kurang Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja berada dalam skala 0 – 33%.	Mengukur

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar dengan kriteria

Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja sesuai dengan standar dengan kriteria berada dalam skala 67 – 100%.	Membandingkan
Cukup Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja sesuai dengan standar dengan kriteria berada dalam skala 34 – 66%.	Membandingkan
Kurang Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator kinerja sesuai dengan standar dengan kriteria berada dalam skala 0 – 33%.	Membandingkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena memenuhi kaidah – kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.(Sugiyono; 2017; 7).

Untuk mengukur bagaimana efektivitas DLHK Prov.Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas pelayanan berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau , Kota Pekanbaru. dalam penelitian ini pada Pengendalian Bidang Kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2017;80 - 81)

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Sub Populasi	Populasi	Responden	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas	1	1	100 %
2.	Sekretaris	1	1	100 %
3.	Kepala Bidang pengendalian pencemaran,kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	1	1	100 %
4.	K.Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	100 %
5.	Staf Bidang Pengendalian	3	3	100 %
6.	Masyarakat yang terdampak kebakaran	50	25	50 %
Jumlah		57	32	100 %

Sumber : Olahan Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono 2017;81).

Dan adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pegawainya digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan digunakan teknik *simple random sampling* (Sugiyono,2017;82) . Dikatakan *simple* (Sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila *homogen* (jenis yang sama). Dan sampel yang penulis tetapkan yaitu Masyarakat yang terdampak kebakaran hutan.

E. Jenis dan Sumber data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data primer

Data yang didapat secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang

berhubungan dengan Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data yang menggambarkan situasi tempat penelitian dan mendukung hasil penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dari penelaah, referensi – referensi atau peraturan.

F. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Angket

Yaitu melakukan pengajuan pertanyaan secara terstruktur dan sistematis kepada responden penelitian dalam memperoleh data mengenai Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

b. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang

dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

c. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis mengklasifikasikan sesuai analisis. Hasilnya kemudian dianalisis secara kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, serta dilengkapi dengan uraian dan informasi yang mendukung, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP							■																					
3	Revisi UP									■	■	■	■																
4	Revisi Kuisisioner											■	■																
5	Rekomendasi Survei													■	■														
6	Survei Lapangan															■	■												

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi /DPRDS/ DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Visi Dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul Di Indonesia”

- **Berdaya Saing** : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
- **Sejahtera** : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- **Bermartabat** : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.
- **Unggul** : Menjadikan Riau berprestasi di Bidang Keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Secara geografis, geokonomi dan geopolitik, Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis baik saat ini maupun yang akan datang terkait kawasan jalur perdagangan regional dan internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau dimulai dari 01⁰05'00 " Lintang Selatan sampai 02⁰25'00 " Lintang Utara dan 100⁰00'00 " hingga 105⁰05'00" Bujur Timur. luas ± 8.915.016 ha. Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan luas wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas sekitar 1.379.837 ha. atau sekitar 15,48% dari total luas Provinsi Riau.

Diwilayah Provinsi Riau ada 15 sungai yang dianggap penting 4 sungai yang penting untuk prasarana sebagai berikut:

- Sungai Siak (300Km),

- Sungai Rokan (400Km),
- Sungai Kampar (400Km),
- Dan Sungai Indragiri (500Km).

Provinsi Riau merupakan daerah beriklim tropis dengan suhu maksimum antara 35,10C dan minimum 21,80C. Provinsi Riau tergolong tidak mudah terbakar dengan indeks potensi kebakaran hanya 0-330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, di Provinsi Riau selalu terdapat banyak titik panas yang terjadi setiap triwulan saat bencana terjadi di Provinsi Riau. Sedangkan intensitas Curah hujan adalah 1700mm - 400mm / tahun.

B. Sejarah Ringkas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau

Menurut Cahyono,dkk (2015.) Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering sekali terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian lokal maupun global.. Kebakaran hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.195/Kpts-II/1996 didefinisikan sebagai keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya(Rasyid, 2014). Berdasarkan sumber penyebabnya, kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebakaran hutan yang terjadi secara alami dan kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah manusia. Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklus yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan

hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).

Kebakaran dapat terjadi jika tersedia oksigen, sumber penyulut, bahan bakar, menghasilkan karbondioksida, panas, dan partikel koloid lain. Proses pembakaran adalah kebalikan proses fotosintesis. Sehubungan dengan hal tersebut, kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi disebabkan karena terdapatnya sumber penyulut dan bahan bakar di alam. Sumber penyulut kebakaran hutan adalah perubahan karakteristik kependudukan yang mengakibatkan terjadinya lahan yang sengaja dibakar untuk kepentingan dalam berbagai kepentingan. Kebakaran dipermukaan lahan gambut memiliki laju yang sangat tinggi yaitu sebesar 502,5 kg/m² (Akbar dkk, tanpa tahun). Kebakaran lahan gambut dapat dengan mudah terjadi jika dalam kondisi kering. Lahan gambut dapat kering karena dikeringkan dengan cara pembuatan kanal-kanal yang mengalirkan air dari rawa gambut ke sungai. Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara alami tidak berbahaya dimusim kemarau dengan dampak yang sangat kecil dari kebakaran tersebut. Kebakaran hutan yang terjadi secara alami dapat memberikan dampak positif karena dapat menurunkan jenis keanekaragaman hayati yang terlalu dominan untuk menyeimbangkan ekosistem di hutan atau lahan gambut. Proses pembakaran lahan gambut dimulai dengan menyalakan api yang menyebabkan api berpindah ke segala arah. Kebakaran yang terjadi dipermukaan sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Saat

kecepatan angin tinggi maka kebakaran yang terjadi juga akan membesar dan dapat menyebabkan kebakaran. Bagian dari pohon yang terbakar dapat diterbawa angin dan jatuh ke tempat baru sehingga memicu kebakaran di lokasi lain. Semakin rendah kadar air pada gambut maka semakin cepat pembakarannya. Kebakaran gambut masih bisa terjadi pada kadar air 119% yang merupakan kadar air kritis kebakaran gambut. Tingkat dekomposisi gambut juga mempengaruhi keterbakaran gambut, semakin matang gambut (jenis saprik) semakin sulit terbakar dibandingkan dengan jenis gambut yang belum matang (jenis fibrik dan hemik). Tinggi muka air akan mempengaruhi kadar air gambut, sementara curah hujan mempengaruhi tinggi muka air lahan gambut (Saharjo dan Syaufina, 2004).

Provinsi Riau yang memiliki luas daerah 9,4 juta ha sekitar 40% (3,9 juta ha) berupa dataran rendah bergambut dan sebagian diantaranya dipengaruhi oleh pasang surut. Keberadaan lahan gambut di Riau didukung oleh kondisi topografi landai dan iklim dengan curah hujan 1700-4000 mm/tahun. Lahan gambut di Riau merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut terluas di Sumatera. Hal ini didasarkan pada data yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Kedalaman lahan gambut yang terdapat di provinsi ini mencapai 50 cm sampai lebih dari 300 cm. Provinsi Riau yang selama 2 dekade terakhir telah mengalami eksploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran. Provinsi ini telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi terutama padalihan kering dan pasang surut dengan luasan mencapai lebih dari 2 juta ha. Hal ini menyebabkan pada lima tahun terakhir investor di bidang perkebunan dan

HTI mengarah ke lahan basah atau lahan gambut. Kondisi lahan di Provinsi Riau menurut DDA tahun 2015, lahan basah lebih mendominasi di Provinsi Riau. Dalam proses pembukaan lahannya untuk perkebunan dan HTI menggunakan metode yang murah dan efektif dengan cara membakar. Hal ini menyebabkan potensi kebakaran hutan di Provinsi Riau besar. Kasus kebakaran hutan di Riau terparah terjadi pada tahun 1997-1998 yang merupakan kasus kebakaran hutan terparah di Indonesia hingga saat ini. Kemudian kasus kebakaran hutan sering terjadi di Provinsi Riau sampai tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian materil dan non materil.

C. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan -Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang dan 16 (enam belas) UPT dengan rincian:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan/dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sub Bagian yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum.
- d. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 3. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
- f. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh Kepala seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
2. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
3. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis tertentu, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Surat Kementerian Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap. Berikut ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

- a. UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. UPT Pembenuhan Tanaman hutan;
- d. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura;
- e. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Besar Serkap.
- f. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi

- g. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau
- h. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandau
- i. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rokan
- j. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah
- k. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri
- l. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek
- m. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi
- n. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah
- o. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri
- p. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi

Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu;
 - d) Seksi Pengujian; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- d) Seksi Pelatihan Kehutanan; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Hutan terdiri dari:
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Konsevasi Sumberdaya Genetika dan Pemuliaan Tanaman
 - d) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura terdiri dari :
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;
 - d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Besar Serkap terdiri dari:
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;
 - d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan

- e) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapi-api, Bengkalis Pulau, Mandau, Rokan, Suligi Batu Gajah, Kampar Kiri, Sorek, Tebing Tinggi, Mandah, Indragiri, Singingi terdiri dari:
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;
 - d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan TUPOKSI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau didukung oleh pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.1. PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar (SD)	7 Orang	0,72
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	8 Orang	0,82
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	465 Orang	47,64
4	Diploma (D3)	18 Orang	1,84

5	Diploma (D4)	12 Orang	1,23
6	Sarjana (S1)	373 Orang	38,22
7	Pasca Sarjana (S2)	93 Orang	9,53
Total		976 Orang	100

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel IV.2. PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Tahun 2018	%
1	Golongan I / Juru	5 Orang	0,51
2	Golongan II / Pengatur	229 Orang	23,5
3	Golongan III / Penata	675 Orang	69,2
4	Golongan IV / Pembina	67 Orang	6,86
Jumlah		976 Orang	100

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel IV.3. PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan/Eselon	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1 Orang	0,10
2.	Eselon III	22 Orang	2,25

3.	Eselon IV	66 Orang	6,76
4.	Staf/Non Struktural	887 Orang	90,88
J U M L A H		976 Orang	100,00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

Tabel IV.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah	%
1.	Diklatpim I	0 Orang	0
2.	Diklatpim II	2 Orang	0,87
3.	Diklatpim III	51 Orang	22,08
4.	Diklatpim IV	178 Orang	77,06
J U M L A H		231 Orang	100

Sumber : DLHK Provinsi Riau, 2018

Tabel IV.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
1	Pria	777 Orang	79.61
2	Wanita	199 Orang	20.39
TOTAL		976 orang	100

Sumber : *DLHK Provinsi Riau, 2018*

Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan Rakyat.

Makna visi sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 2019. Upaya pemulihan ini perlu pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.
- b. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari: Pembinaan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan sumber daya hutan yang didukung oleh sistem informasi kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada peningkatan presentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk

mengelola sumber daya hutan yang lestari secara professional dapat meningkat dalam lima tahun kedepan.

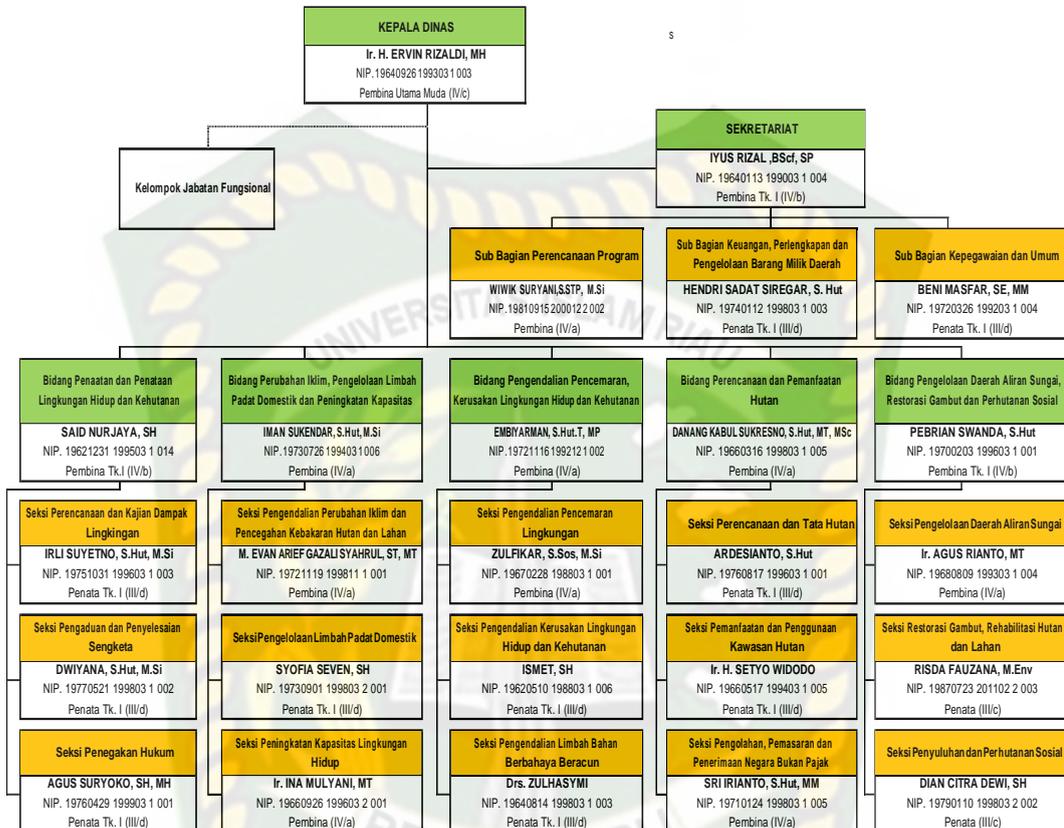
2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- c. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak

Gambar IV.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 78 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

Ir. H. ERVIN RIZALDI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 199303 1 003

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai pendidikan, Umur, jenis kelamin dan pekerjaan responden.

a. Tingkat Pendidikan Responden

Analisis pertama dilakukan terhadap data tingkat pendidikan responden dan hasilnya padatable V.1 berikut ini :

Tabel V.1 Distribusi Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	5	16%
2	SMP	10	31%
3	SMA	6	19%
4	Diploma	4	12%
5	Sarjana	7	22%
Jumlah		32	100%

Sumber :Olahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel diatas dapat uraikan bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SD, SMP, SMA, Diploma III, Strata Satu (S1), Magister (S2). Tingkat Pendidikan SD 5 Orang, SMP 10 orang, SMA 6 orang, Diploma III 4 orang, Strata Satu (S1) terdiri dari 3 orang, Strata Dua (S2) terdiri dari 4 orang.

b. Tingkat Umur Responden

Analisis kedua dilakukan terhadap data usia responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2 Distribusi Usia Responden

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	20 – 25	7	22%
2	26 – 30	5	16%
3	31 – 35	6	19%
4	36 – 40	3	9%
5	41 – 45	8	25%
6	≥ 46	3	9%
Jumlah		32	100%

Sumber : Olahan Penulis , 2020

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang berumur 20-25 tahun sebanyak 7 orang, yang berumur 26-30 tahun sebanyak 5 orang, yang berumur antara 31-35 tahun sebanyak 6 orang dan berumur 36-40 tahun sebanyak 3 orang, yang berumur 41-45 sebanyak 8 dan umur 46 tahun keatas sebanyak 3 orang.

c. Jenis Kelamin Responden

Analisis ketiga dilakukan terhadap data jenis kelamin responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3 Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masyarakat		
	- Laki-laki	21	66%
	- Perempuan	4	12%
2	Pegawai dan Kadis		
	- Laki-laki	5	16%

	- Perempuan	2	6%
	Jumlah	32	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin Laki-Laki di masyarakat adalah 21 orang, sedangkan jenis kelamin Perempuan 4 orang. Jadi jenis kelamin informan didominasi oleh Laki-Laki dengan jumlah terbanyak 7 orang. Selanjutnya jenis kelamin responden pegawai Laki-Laki dengan jumlah 5 orang sedangkan sisanya responden Laki-Laki dengan jumlah 2 orang.

d. Pekerjaan Responden

Analisis keempat dilakukan terhadap data pekerjaan responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4 Distribusi Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PNS	7	22%
2	Wiraswasta	5	16%
3	IRT	4	12%
4	Karyawan swasta	16	50%
	Jumlah	32	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah karyawan swasta dengan jumlah 16 orang (50%). Sedangkan sisanya adalah PNS dengan jumlah 7 orang (22%), Wiraswasta dengan jumlah 5 orang (16%), IRT dengan jumlah 4 orang (3%).

B. Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Pengendalian ialah bagian dari salah satu fungsi manajemen yang didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai fungsi pengawas. Dengan adanya pengendalian pimpinan diharapkan mampu mengetahui apa yang telah dan sedang dilaksanakan, sehingga pimpinan bisa melakukan evaluasi hasil kerja dan bisa melihat apakah disiplin kerja sudah sesuai atau belum..

a. Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja Dengan Kriteria

Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai standar yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu kebijakan dan perintah, mulai dari target hingga catatan kehadiran dan keamanan Dan hasil tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja Dengan Kriteria

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menentukan Prediksi Kinerja	10 (40.0%)	10 (40.0%)	5 (20.0%)	25
2	Pelaksanaan Kinerja	6 (24.0%)	13 (52.0%)	6 (24.0%)	25
3	Berpedoman Pada Standar	8 (32.0%)	12 (48.0%)	5 (20.0%)	25
Jumlah		24	35	16	75
Rata – Rata		11	12	5	25
Presentase		32%	47%	21%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menentukan prediksi kinerja kategori baik sebanyak 10 orang (40,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 10 orang (40,0%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 5 orang (20,0%).

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu pelaksanaan kinerja kategori baik sebanyak 6 orang (24,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 13 orang (52,0%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 6 orang (24,0%).

Item yang ketiga yaitu berpedoman pada standar kategori baik sebanyak 8 orang (32,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 12 orang (48,0%), sedangkan item kurang baik sebanyak 5 orang (20,0%). Secara keseluruhan dari indikator menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dengan kriteria berada pada kategori cukup baik dengan responden 12 orang atau sebesar (47%) hal ini menyatakan bahwa standar dan metode dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah sesuai namun perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan tanggapan responden pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dengan kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Pegawai Tentang Menetapkan Standar dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja Dengan Kriteria

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menentukan Prediksi Kinerja	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3
2	Pelaksanaan Kinerja	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3

3	Berpedoman Pada Standar	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
Jumlah		8	1	0	9
Rata – Rata		3	0	0	3
Presentase		89%	11%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item penilaian menentukan prediksi kinerja kategori baik sebanyak 2 orang (66,7%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 1 orang (33.3%)

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu pelaksanaan kinerja kategori baik sebanyak 3 orang (100%), untuk kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada yang menjawab.

Item yang ketiga yaitu berpedoman pada standar kategori baik sebanyak 3 orang (100%), untuk kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada yang menjawab.

Secara keseluruhan dari indikator menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dengan kriteria yang menjawab baik sebanyak 3 orang atau (89%) hal ini menyatakan bahwa pegawai sudah melakukan tugas sesuai dengan standar dan metode untuk pengukuran kinerja dengan kriteria sudah berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas namun diwakilkan oleh sekretaris dapat diketahui hasil wawancara sebagai berikut :

“Standar yang dilakukan DLHK diatur dalam PERDA No.01 Tahun 2019 disitu terdapat pelaksanaan teknis DLHK dalam mengatasi kebaran hutan. Sejauh ini standar DLHK efektif dalam mengatasi kebakaran hutan”.

(Wawancara Iyus Rizal, Sekretaris DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

“pasti itu dek, dalam pengendalian kebakaran hutan harus sesuai prosedur, balik lagi apa yang dikatakan sebelumnya oleh bapak sekretaris DLHK semuanya tertera”. (Wawancara Embiyarman, Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu sebagai berikut:

“pelaksanaan teknis yang dilakukan sudah memenuhi standar kinerja dari DLHK Provinsi Riau bisa kita lihat dari Perda No 01 tahun 2019 tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan / lahan dalam bab 3 pasal 5 terdapat pencegahan kebakaran hutan/lahan”. (Wawancara IR. Tri Atmanto, Kepala Seksi DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja mengikuti peraturan dari PERMENTAN dan diberikan kepada daerah untuk menjadi standar di setiap daerah termasuk di Provinsi Riau.

b. Mengukur Kinerja

Mengukur kinerja sangat penting karena memiliki nilai strategis. Informasi mengenai kinerja dari pegawai serta faktor yang mempengaruhi dari kinerja sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja pegawai hendaknya dapat bisa dinilai dan di evaluasi berhasil atau tidaknya pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil penilaian dari mengukur kinerja Berikut ini hasil penilaian dari mengukur kinerja :

Tabel V.7. Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Mengukur Kinerja

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penilaian Pelaksanaan Tugas	11 (44.0%)	10 (40.0%)	4 (16.0%)	25
2	Memprediksi Hasil Laporan	8 (32.0%)	10 (40.0%)	7 (28%)	25
3	Membandingkan Hasil Dan Laporan	9 (36.0%)	10 (40.0%)	6 (24.0%)	25
Jumlah		28	30	17	75
Rata – Rata		9	10	6	25
Presentase		37%	40%	23%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item penilaian mengenai penilaian pelaksanaan tugas kategori baik sebanyak 11 orang (44,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 10 orang (40,0%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 4 orang (16,0%).

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu memprediksi hasil laporan kategori baik sebanyak 8 orang (32,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 10 orang (40,0%), sedangkan item kurang baik sebanyak 7 orang (28%).

Item ketiga yaitu membandingkan hasil dengan laporan kategori baik sebanyak 9 orang (36,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 10 orang (40,0%), sedangkan item kurang baik sebanyak 6 orang (24,0%).

Secara keseluruhan dari indikator mengukur kinerja berada pada kategori cukup baik dengan jumlah 10 orang atau (40%). Hal ini dilihat dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tiap tahunnya bias bekerja dengan cepat dalam mengatasi kebakaran hutan.

Sedangkan tanggapan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang mengukur kinerja sebagai berikut:

Tabel V.8. Tanggapan Responden Pegawai Tentang Mengukur Kinerja

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penilaian Pelaksanaan Tugas	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
2	Memprediksi Hasil Laporan	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
3	Membandingkan Hasil Dan Laporan	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
Jumlah		9	0	0	9
Rata – Rata		3	0	0	3
Presentase		100%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item penilaian mengenai penilaian pelaksanaan tugas kategori baik sebanyak 3 orang (100%) untuk kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada yang menjawab.

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu memprediksi hasil laporan kategori baik sebanyak 3 orang (100%) untuk kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada yang menjawab.

sedangkan item ketiga yaitu membandingkan hasil dan laporan tanggapan baik sebanyak 3 orang (100%) untuk kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada yang menjawab.

Secara keseluruhan dari indikator mengukur kinerja yang menjawab baik sebanyak 3 orang atau (100%) hal ini dapat dilihat dari tugas pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas namun diwakilkan oleh sekretaris dapat diketahui hasil wawancara sebagai berikut :

“ dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan DLHK Provinsi Riau dapat dilihat dari penanganan dalam mengatasi kebakaran hutan dimana tiap tahunnya selalu bisa kita atasi dengan bekerja sama dengan BPBD. Namun terkadang dalam pelaksanaan penanganan karhutla terjadi permasalahan di lapangan salah satunya yaitu akses menuju ke tkp.” (Wawancara Iyus Rizal, Sekretaris DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

“kinerja dari DLHK itu sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang baik dapat kita lihat bagaimana DLHK membuat progres terhadap penanganan hutan agar dapat mengatasi kebakaran hutan diantaranya yaitu peralatan dalam penanganan karhutla yang sesuai standar.”
(Wawancara Embiyarman, Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu sebagai berikut:

“DLHK tidak bekerja sendiri DLHK bekerja sama dengan BPBD, POLDA Pekanbaru dan berkomitmen bersama antara provinsi dan kab/kota dalam mengatasi kebakaran hutan agar tidak meluasnya hutan yang terbakar. Kemudian DLHK membuat pemetaan daerah yang rawan bencana karhutla. Dibuatnya pemetaan tersebut agar mengetahui kondisi di lapangan.”
(Wawancara IR. Tri Atmanto, Kepala Seksi DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Dari wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dalam mengukur kinerja bisa dikatakan berjalan baik namun tidak bisa bekerja sendiri terdapat beberapa lembaga yang membantu dalam mengatasi kebakaran hutan.

c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Dalam melaksanakan tugas terdapat keberhasilan suatu kegiatan sesuai dengan standar operasional, standar ini berfungsi sebagai pandangan – pandangan

atas pekerjaan yang dilakukan untuk selanjutnya. Dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau sebagai suatu lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengawasan lingkungan hidup. Untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melakukan perbandingan atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan pekerjaan yang akan datang. Berikut hasil penilaian dari membandingkan kinerja dengan standar :

Tabel V.9. Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Membandingkan Kinerja dengan standar

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membuat Tolak Ukur	5 (20.0%)	13 (52.0%)	7 (28.0%)	25
2	Pencapaian Pelaksanaan Kinerja	6 (24.0%)	12 (48.0%)	7 (28.0%)	25
3	Menetapkan Kinerja Aktual	5 (20.0%)	14 (56.0%)	6 (24.0%)	25
Jumlah		16	39	20	75
Rata – Rata		5	13	7	25
Presentase		21%	52%	27%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item penilaian mengenai penilaian membuat tolak ukur kategori baik sebanyak 5 orang (20%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 13 orang (52%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 7 orang (28%). Artinya kategori penilaian membuat tolak ukur cukup baik, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tingkat berhasil atau tidaknya dalam mengatasi kebakaran hutan tersebut harus dilakukan agar bisa di evaluasi apakah sudah memenuhi standar atau belum.

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu pencapaian pelaksanaan kinerja kategori baik sebanyak 6 orang (24%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 12 orang (48%), sedangkan item kurang baik sebanyak 7 orang (28%).

Item ketiga yaitu menetapkan kinerja aktual kategori baik sebanyak 5 orang (20%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 14 orang (56%), sedangkan item kurang baik sebanyak 6 orang (24%). Secara keseluruhan dari indikator Membandingkan Kinerja dengan standar rata – rata menjawab baik sebanyak 13 orang (52%). Hal ini bias dilihat dari perbandingan kerja di tiap tahunnya dalam mengatasi kebakaran hutan mulai membaik tetapi perlu ditingkatkan agar dalam penganganan kebakaran hutan tidak menyebar.

Sedangkan tanggapan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang membandingkan kinerja dengan standar adalah sebagai berikut:

Tabel V.10. Tanggapan Responden Pegawai Tentang Membandingkan Kinerja dengan standar

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membuat Tolak Ukur	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
2	Pencapaian Pelaksanaan Kinerja	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
3	Menetapkan Kinerja Aktual	3 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3
Jumlah		9	0	0	9
Rata – Rata		3	0	0	3
Presentase		100%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas pada item membuat tolak ukur yang menjawab baik sebanyak 3 orang atau (20%). Selanjutnya pada item kedua pencapaian pelaksanaan kinerja menjawab baik sebanyak 3 orang atau (20%). Pada item ketiga menetapkan kinerja aktual menjawab baik sebanyak 3 orang atau (20%).

Menarik kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi Membandingkan Kinerja dengan standar mendapatkan rata – rata jawaban baik dengan jumlah 3 orang (100%) . Hal ini dari target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam penanganan kebakaran hutan sudah memenuhi standar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas namun diwakilkan oleh sekretaris dapat diketahui hasil wawancara sebagai berikut :

“ dari standar kinerja yang ditetapkan bahwa setiap tahunnya dalam penanganan karhutla mengalami peningkatan karena DLHK selalu berupaya agar bisa menekankan meluasnya karhutla. (Wawancara Iyus Rizal, Sekretaris DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

“ Kinerja DLHK dalam perbandingan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan setiap tahunnya setiap kinerja DLHK selalu memenuhi target .” (Wawancara Embiyarman, Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu sebagai berikut:

“Setiap tahunnya dalam penanganan karhutla selalu mengalami peningkatan dengan standar yang ditetapkan oleh DLHK telah sesuai dengan yang terjadi di lapangan.” (Wawancara IR. Tri Atmanto, Kepala Seksi DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Dari wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dalam membandingkan kinerja dengan standar bahwa dalam setiap tahunnya penanganan karhutla mengalami peningkatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

d. Mengambil Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau dapat mengadakan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan – penyimpangan yang telah dilaksanakan terutama pada permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Dengan cara mencari sebab – sebab terjadinya penyimpangan dengan menyesuaikan hasil pekerjaan sesuai dengan hasil pekerjaan yang berpedoman pada perencanaan yang telah di tetapkan. Berikut hasil penilaian dari mengambil tindakan dari perbaikan :

Tabel V.11. Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Mengambil Tindakan Perbaikan

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Melakukan perbaikan kinerja	9 (36.0%)	14 (56.0%)	2 (8.0%)	25
2	Koreksi secara langsung	7 (28.0%)	12 (48.0%)	6 (24.0%)	25
3	Memperbaiki bila terjadi kesalahan	12 (48.0%)	8 (32.0%)	5 (20.0%)	25
Jumlah		28	34	13	75
Rata – Rata		9	11	4	25
Presentase		37%	45%	17%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat 25 orang mengenai item penilaian mengenai melakukan perbaikan kinerja kategori baik sebanyak 9 orang (36,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 14 orang (56,0%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 2 orang (8,0%).

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu pelaksanaan kinerja kategori baik sebanyak 7 orang (28,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 12 orang (48,0%), sedangkan untuk item kurang baik sebanyak 6 orang (24,0%).

Item yang ketiga yaitu berpedoman pada standar kategori baik sebanyak 12 orang (48,0%), sedangkan tanggapan cukup baik sebanyak 8 orang (32,0%), sedangkan item kurang baik sebanyak 5 orang (20,0%). Secara keseluruhan dari indikator mengambil tindakan perbaikan yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang (45%) hal ini dalam pengambilan tindakan perbaikan telah melakukan perbaikan koreksi secara langsung dan memperbaiki bila terjadi kesalahan.

Sedangkan tanggapan responden pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang mengambil tindakan adalah sebagai berikut:

Tabel V.12. Tanggapan Responden Pegawai Tentang Mengambil Tindakan Perbaikan

No	Pernyataan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Melakukan perbaikan kinerja	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3
2	Koreksi secara langsung	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3
3	Memperbaiki bila terjadi kesalahan	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3
Jumlah		6	3	0	9
Rata – Rata		2	1	0	3
Presentase		67%	33%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item melakukan perbaikan kinerja kategori baik sebanyak 2 orang (66,7%), item kurang baik sebanyak 1 orang (33,3%). Selanjutnya indikator koreksi secara langsung kategori baik sebanyak 2 orang (66,7%), item kurang baik sebanyak 1 orang (33,3%). Indikator ketiga memperbaiki bila terjadi kesalahan kategori baik sebanyak 2 orang (66,7%), item kurang baik sebanyak 1 orang (33,3%).

Berdasarkan tanggapan seluruh responden tentang kategori mengambil tindakan perbaikan rata rata menjawab cukup baik dengan jumlah 2 orang (67%) karena bila terjadi kesalahan langsung bergerak cepat agar tidak menimbulkan kesalahan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas namun diwakilkan oleh sekretaris dapat diketahui hasil wawancara sebagai berikut :

“ tindakan perbaikan untuk mengukur kinerja mencakup 3 kriteria perbaikan yang ditetapkan. (Wawancara Iyus Rizal, Sekretaris DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

“ Kinerja DLHK dalam mengambil tindakan perbaikan di koreksi secara langsung dan diperbaiki bila terjadi kesalahan.” (Wawancara Embiyarman, Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu sebagai berikut:

“dari ketiga kriteria yang ditetapkan dalam mengambil tindakan perbaikan harus tidak boleh ada yang kurang dari 3 kriteria tersebut.” (Wawancara IR. Tri Atmanto, Kepala Seksi DLHK Provinsi Riau tanggal 22 desember 2020)

Dari wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dalam mengambil tindakan perbaikan menetapkan 3 kriteria dan dari 3 kriteria tersebut harus terpenuhi bila tidak terpenuhi maka harus melakukan perbaikan.

C. Rekapitulasi Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja	8 (32.0%)	12 (46.7%)	5 (21.3%)	28
2	Mengukur Kinerja	9 (37.3%)	10 (40.0%)	6 (22.7%)	25
3	Membandingkan Kinerja dengan standar	5 (21.3%)	13 (52.0%)	7 (26.7%)	25
4	Mengambil Tindakan	9 (37,3%)	11 (45,3%)	4 (17,3%)	25
JUMLAH		23	35	18	84
RATA-RATA		8	12	6	28
PERSENTASE		32%	46%	22%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan melihat rekapitulasi hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari 4 indikator yang telah peneliti lakukan dengan 10 item pertanyaan yang diajukan ke 25 orang menganggapi baik 8 orang (32%), kemudian untuk menanggapi cukup

baik dianggapi 12 orang (46%), sedangkan tanggapan kurang baik 6 orang (22%).

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan terhadap Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdapat 4 indikator yaitu menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja, mengukur kinerja, membandingkan standar dengan kinerja dan mengambil tindakan perbaikan berdasarkan tanggapan masyarakat bahwa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah memenuhi namun harus tetap ditingkatkan agar ditiap tahunnya mengurangi kesalahan kesalahan yang terjadi

Selanjutnya tabel rekapitulasi responden dari sudut pandang pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja	3 (32.0%)	0 (46.7%)	0 (21.3%)	3
2	Mengukur Kinerja	3 (37.3%)	0 (40.0%)	0 (22.7%)	3
3	Membandingkan Kinerja dengan standar	3 (21.3%)	0 (52.0%)	0 (26.7%)	3
4	Mengambil Tindakan	2 (37,3%)	1 (45,3%)	0 (17,3%)	3
JUMLAH		11	0	0	9
RATA-RATA		3	1	0	3

PERSENTASE	89%	11%	0%	100%
-------------------	-----	-----	----	------

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan melihat rekapitulasi hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari 4 indikator yang telah peneliti lakukan dengan 10 item pertanyaan yang diajukan ke 3 orang yang menjawab baik sebanyak 3 orang (89%) dan menjawab cukup baik 1 orang (11%).

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan terhadap Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdapat 4 indikator bahwa semuanya sesuai yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Kesimpulan hasil dari penelitian tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau peneliti menilai **“Cukup baik”**, dengan yang. Hal ini karena masih belum efektifnya standar dari keseluruhan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau, kemudian masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam penanganan kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya karhutla agar bisa menekan angka kebakaran hutan di tiap tahunnya tidak bertambah setiap tahunnya. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diantaranya luas lahan gambut yang membuat susahna penanganan

kebakaran hutan, lokasi yang sulit dijangkau, rendahnya partisipan masyarakat dalam pencegahan karhutla.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari hasil penelitian melalui angket, wawancara, dan observasi yang dilakukan bahwa disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Manajemen Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan 3 indikator dengan 4 sub indikator tanggapan responden paling tertinggi terdapat di indikator membandingkan kinerja dengan standar dengan menjawab cukup baik.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam membandingkan kinerja dengan standar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau lebih ditingkatkan tiap tahunnya agar segala sesuatunya bisa berjalan secara terkendali.

2. Dalam mengukur kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar pengukuran kinerja yang dicapai harus sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Dalam menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau harus lebih memaksimalkan dengan standar dan metode untuk mengukur kinerja agar hasil pelaksanaan kinerja yang dilakukan bisa sesuai rencana.
4. Adapun yang harus dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(DLHK) Provinsi Riau yaitu memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
5. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan secara liar agar kedepannya bisa terciptanya Riau bebas dari kebakaran hutan.
6. Masyarakat harus berperan aktif dengan memberikan kontrol yang efektif dan juga berperan aktif menjadi unsur pendorong dalam upaya memangani kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Amanah, Dita dan Harahap Dedy Ansari. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Syahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Daft, Richard L. 2012. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Danu, St. Munadjat. 1980. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Bandung: Buku V Sektoral 5.
- Hamim, Sufian. 2003. *Administrasi, Organisasi, Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2019. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Priansa Donni Juni, Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.
- Rusby, Zulkifli. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Pusat KajianFAI UIR.

- Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2001. *Management Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto. 2000. *Penggantar Ilmu Administrasi*. Bandung: Penerbit Nandar Maju.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- . 2016. *Ilmu Administras*. Sleman: Pustaka Pelajar.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Terry George R, Leslie W.Rue. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media Group.

Zulifki. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

———. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumentasi :

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturam Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Lingkungan Hidup Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019-2024

